



Analisis Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah di Kantor Camat Sei Balai

Sri Wulandari

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: whulandhary2411@gmail.com

Aqwa Naser Daulay

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: aqwanaserdaulay@uinsu.ac.id

Abstract. After Government Regulation (PP) No.71 of 2010 concerning Government Accounting Standards (SAP) and Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) No.64 of 2013 were issued, Article 10 paragraph (2) states that every regional government is obliged to provide accurate financial reports and accurate according to the provisions in effect starting in the 2015 fiscal year, if they use accrual-based SAP. The purpose of this research is to find out how the presentation of financial reports is carried out and how ready the district government is. Sei Balai to present accrual-based SAP financial reports. Data was collected through field studies and analyzed using descriptive methods. Data was collected through field research. The research results show that the government of Kec. Sei Balai has not implemented the PP. No.71 of 2010, but is in accordance with PP. No.24 of 2005, which means using the cash basis for accruals. Apart from that, there are obstacles in preparation because it requires an increase in the number and quality of implementing human resources with appropriate accounting education, socialization, and technical guidance to produce reliable and transparent financial reports. There is a shortage of implementing human resources in each SKPD and supporting equipment is not yet ready.

Keywords: Accounting, SAP, Government.

Abstrak. Setelah Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.64 Tahun 2013 dikeluarkan, Pasal 10 ayat (2) menyatakan Setiap pemerintah daerah diharuskan untuk memberikan laporan keuangan yang tepat dan akurat sesuai ketentuan yang berlaku mulai tahun anggaran 2015, jika mereka menggunakan SAP berbasis akrual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan dilakukan dan seberapa siap pemerintah Kec. Sei Balai untuk menyajikan laporan keuangan berbasis SAP berbasis akrual. Data dikumpulkan melalui studi lapangan dan dianalisis dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kec. Sei Balai belum menerapkan PP. No.71 Tahun 2010, tetapi telah sesuai dengan PP. No.24 Tahun 2005, yang berarti menggunakan basis kas untuk akrual. Selain itu, ada hambatan dalam persiapan karena jumlah dibutuhkan peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia pelaksana dengan pendidikan akuntansi yang sesuai, sosialisasi, dan bimbingan teknik untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan transparan. Ada kekurangan sumber daya manusia pelaksana di setiap SKPD dan perangkat pendukung belum siap.

Kata Kunci: Akuntansi, SAP, Pemerintah.

PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan untuk memudahkan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah harus mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) diterapkan untuk ada kesamaan di semua laporan keuangan, baik pemerintahan pusat maupun daerah.

Pergeseran paradigma tentang pemerintahan saat ini mendorong kita untuk membangun sistem tata pemerintahan yang baik atau juga disebut sebagai tata pemerintahan yang baik yang mana akan menghasilkan tata pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, partisipatif, dan akuntabel serta memiliki integritas.

Perubahan fundamental dalam perspektif pemerintahan diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Ini memerlukan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah daerah untuk bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional daripada hanya bergantung pada pemerintah pusat.

Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan diperlukan untuk membangun sistem tata pemerintahan yang baik karena proses akuntansi menghasilkan informasi keuangan untuk berbagai pihak. Perubahan di bidang akuntansi harus didasari oleh SAP.

Dengan diterbitkannya PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan dan yang di harapkan dapat menjadi acuan, patokan serta standar untuk diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah yang wajib untuk menyajikan laporan keuangan agar lebih terciptanya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Peraturan ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap Daerah Otonom Kabupaten/Kota maupun Propinsi dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual pada pemerintah daerahnya. Dalam hal ini Pemkot Bitung sebagai pengguna anggaran juga wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai PP No.71 Tahun 2010 dan Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah.

Sejalan dengan akan diterapkannya SAP Berbasis Akrual baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dengan direvisinya PP No.24 Tahun 2005 menjadi PP No.71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, membawa beberapa perubahan dalam standar dan mekanisme penyajian laporan keuangan di pemerintah, serta didukung dengan ditetapkannya Permendagri No.64 Tahun 2013 Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015, maka peneliti akan mencoba menganalisis penyajian laporan keuangan dan kesiapan pemerintah Kec. Sei Balai untuk menerapkan SAP di daerah tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

(Martani, 2012) dalam bukunya Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK menyebutkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah standar akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan bagi pemerintah pusat maupun daerah. PP RI No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara secara rinci agar dapat menemukan pola-pola yang dapat dipahami. Dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena mengenai masalah ataupun keadaan tertentu yang dijadikan objek penelitian yang mana nanti ditemukan penjelasan-penjelasan dari makna akan temuan dan pemahaman tertentu.

PENELITIAN TERDAHULU

1. Fitri Rahmadani, 2018. Judul: “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 Tentang Laporan Keuangan Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Subulussalam”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam telah memenuhi

persyaratan penyajian laporan keuangan menurut PSAP No. 01 dan melihat apakah isi laporan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam memenuhi persyaratan minimum isi laporan keuangan sebagaimana dalam PSAP No. 01. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Subulussalam telah melakukan proses Penyusunan Laporan Keuangan akuntasinya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01, untuk proses pencatatannya telah sesuai juga, walaupun ada sedikit kekurangan dalam mencantumkan unsur-unsur pada Laporan Realisasi Anggaran, namun Laporan Keuangan telah diajukan tepat waktu sehingga bisa digunakan oleh kelompok pengguna Laporan Keuangan guna mengambil keputusan.

2. Muhammad Saleh Ash-shiddiq, 2016). Judul: “Analisis Penerapan PSAK No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No.01 tentang Penyajian Laporan Keuangan di Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta (Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan). Metode penelitian yang digunakan adalah dokumentasi dan metode analisis data yang digunakan adalah teknik Miles & Huberman. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta telah menerapkan PSAK No. 01 dalam penyajian Laporan Keuangan yang berupa Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan meskipun ada beberapa perbedaan dalam penyajian laporan keuangan Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta dengan PSAK No. 01 yaitu tidak adanya Laporan Perubahan Ekuitas karena semua ekuitas yang ada pada Puskesmas Depok III Sleman Yogyakarta merupakan milik Pemda setempat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis sistem dalam sebuah penerapan menurut David Easton dalam (Engkus, E, 2019). terdapat 5 instrumen yaitu input, process output, feedback, dan environment. Input. Di dalam proses ini pembentukan kebijakan sebagai interaksi yang terjadi antara lingkungan dan pembuat kebijakan dalam proses yang dinamis.

Input yang diterima adalah dalam bentuk permintaan dan tuntutan. Menurut Permendagri Nomor 79 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Kerja dan Anggaran dan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Process. Tahap ini merupakan transisi dari awal dalam bentuk input dalam bentuk tuntutan dan dukungan menjadi keputusan kebijakan.

Untuk penyajian pos-pos keuangannya sudah sesuai dengan PSAP No. 13 diantaranya terdapat kas dan setara kas, investasi jangka panjang, piutang dari kegiatan BLU, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, ekuitas.

Dengan itu, Kantor Camat Sei Balai telah menyajikan Neraca sesuai dengan ketentuan dalam PSAP No. 13 sebesar 100%. Laporan Operasional yang disajikan oleh Kantor Camat Sei Balai sudah 83% sesuai dengan ketentuan dalam PSAP No. 13, karena terdapat akun pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, surplus/defisit dan tidak menyajikan pos luar biasa. Laporan Arus Kas yang disajikan oleh Kantor Camat Sei Balai sudah 100% sesuai dengan ketentuan dalam PSAP No. 13 karena menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas dan mengklasifikasinya arus masuk dan keluar berdasarkan aktivitas operasi, pendanaan, dan transitoris.

Kantor Camat Sei Balai telah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran 100% sesuai dengan ketentuan dalam PSAP No. 13 karena terdapat akun Pendapatan-LRA, Belanja, surplus/defisit-LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto, dan SiLPA.

Laporan Perubahan Ekuitas yang disajikan oleh Kantor Camat Sei Balai sudah 100% sesuai dengan ketentuan dalam PSAP No. 13 karena menyajikan 3 akun yaitu: Ekuitas awal, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih telah 100% sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAP No. 13 karena menyajikan 6 pos keuangan yaitu: saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA), Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, Lain-lain, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Output merupakan hasil dari suatu proses yang mengubah tuntutan menjadi hasil kebijakan/keluaran kebijakan, suatu sistem harus membuat konflik atau resolusi konflik karena sistem dibangun atas elemen-elemen yang mendukung sistem dan ini tergantung pada interaksi antara berbagai subsistem.

Output merupakan hasil dari suatu proses yang mengubah tuntutan menjadi hasil *Feedback* dilihat bagaimana kebijakan itu ditetapkan menjadi dasar kebijakan lain, atau dapat dikatakan bahwa keluaran sistem ini menjadi input bagi sistem yang lain. Dengan pemerintah menetapkan PSAP No. 13 sebagai standar umum bagi instansi BLUD untuk menyusun laporan keuangannya, dan instansi terkait menerapkannya, maka dengan diterapkannya peraturan tersebut, entitas pelaporan dapat menyusun laporannya secara sistematis.

Sesuai dengan studi dokumentasi yang dilakukan, dengan membandingkan kesesuaian antara penyajian laporan keuangan Kantor Camat Sei Balai tahun 2023 dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 belum sepenuhnya sesuai maka kebijakan yang diambil oleh instansi agar penyajian laporan keuangan pada periode selanjutnya diperbaiki. Di sini, kebijakan terdapat dua bagian yang diketahui, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Di mana kedua lingkungan ini mempengaruhi kebijakan publik yang diterapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada Kantor Camat Sei Balai, laporan keuangan yang disusun pada Tahun Anggaran 2020 sampai Tahun 2023 sudah berjalan dan isinya telah menyajikan informasi posisi keuangan yang cukup sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13, tetapi belum maksimal sepenuhnya karena pada Tahun 2018

ada beberapa komponen laporan keuangan yang tidak disajikan. Kantor camat Sei Balai adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan pada tiap tahun anggarannya. Dan sejak tahun anggaran 2018, entitas pelaporan di Kantor camat Sei Balai menyusun laporannya dalam dua metode yaitu secara manual atau tertulis dan menggunakan aplikasi khusus yang telah disediakan oleh Pemerintah Kantor camat Sei Balai. Peneliti merekomendasikan peningkatan kompetensi sumber daya, baik SDM maupun sumber daya non SDM (sarana dan prasarana).

DAFTAR PUSTAKA

- Engkus, E. (2019). Green Building Policy Formulation in the Municipality of Bandung Indonesia. *Sosiohumaniora*, 21(3), 296–304. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23612>
- Hartati, S., Hendri, E., & Lilianti, E. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 2(2), 167-185.
- Henukh, I. T., Saleh, M. F., & Adelina, Y. E. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Kota Kupang. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 161-184.
- Kawenas, R. I., Kalangi, L., & Lambey, L. (2018). Analisis Penerapan PSAP Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING “GOODWILL.”* <https://doi.org/10.35800/jjs.v9i1.18685>
- Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaL dalam penyajian laporan keuangan pada pemerintah kota bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).
- Maryana, E. (2017). Analisis Kesiapan Implementasi PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan keuangan Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit BLUD Provinsi Sumatera Selatan. *Politeknik Negeri Sriwijaya*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
- PT Alfabet. In Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rahmadani, F. (2018). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 tentang Laporan Keuangan Pemerintahan pada Pemerintah Kota Subulussalam. *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*.

- Sudaryati, E., & Permana, T. D. I. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia (BAKI)*, 5(1), 1-13.
- Wahyuni, N. E., & Adam, H. (2016). Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Dalam Perspektif Teori Institusional: Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4(1).